



Transformasi Perilaku Sosial dan Komitmen Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan guna Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Kasus di Desa Adat Panglipuran)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Km Andini Gayatri Universitas Pendidikan Nasional aandinigayatri@gmail.com +6287840215192</p> <p>I Nyoman Subanda Universitas Pendidikan Nasional nyomansubanda@undiknas.ac.id +6281338704615</p> <p>Ni Ketut Arniti Universitas Pendidikan Nasional ketutarniti@undiknas.ac.id +6281558796606</p> <p>I Wayan Joniarta Universitas Pendidikan Nasional Wayanjoniarta@undiknas.ac.id +6281239189055</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Gayatri, K. A., Subanda, I. N., Arniti, N. K., & Joniarta, I. W. (2025). Transformasi Perilaku Sosial dan Komitmen Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan guna Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Kasus di Desa Adat Panglipuran). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4329-4341.

Abstrak

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa yang dikenal secara global karena keberhasilannya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui sistem adat yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transformasi perilaku sosial masyarakat dalam pelestarian lingkungan yang berlandaskan nilai adat, praktik sosial, dan prinsip Tri Hita Karana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku sosial masyarakat Penglipuran berlangsung secara gradual melalui proses internalisasi nilai adat dan peningkatan kesadaran lingkungan. Kebiasaan menjaga kebersihan, gotong royong, serta pemeliharaan tata ruang kini dilakukan bukan semata karena aturan, melainkan karena kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral. Komitmen masyarakat juga tercermin dari keterikatan emosional terhadap desa, kepatuhan terhadap aturan adat, dan kesadaran etis untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai budaya, spiritualitas, dan pengelolaan berbasis masyarakat memiliki kontribusi besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus pencapaian SDGs pada level lokal.

Kata kunci: perilaku sosial, komitmen masyarakat, Desa Adat Penglipuran, pelestarian lingkungan, SDGs 15.

Abstract

Penglipuran Traditional Village is globally recognized for its success in maintaining environmental cleanliness and sustainability through a strong customary system. This study aims to examine how the transformation of social behavior within the community contributes to environmental conservation based on customary values, social practices, and the principles of Tri Hita Karana. This research employs a descriptive qualitative approach documentation. The findings show that shifts in the community's social behavior occur with data collected through observation, in-depth interviews, and gradually through the internalization of customary values and increased environmental awareness. Practices such as maintaining cleanliness, participating in communal work (gotong royong), and preserving spatial layout are now carried out not merely due to regulations but because of personal awareness and moral responsibility. The community's commitment is reflected in their emotional attachment to the village, adherence to customary rules, and ethical awareness to maintain harmony with nature. Overall, the study reveals that cultural values, spirituality, and community-based management play a significant role in supporting environmental sustainability and achieving the SDGs at the local level.

Keywords: social behavior, community commitment, Penglipuran Traditional Village, environmental conservation, SDGs 15.

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, isu lingkungan menjadi perhatian penting baik dari tingkat nasional maupun Internasional. Pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kini hadir sebagai komitmen global untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Menurut (Aliyah et al., 2024) *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia. Didalam agenda ini terdapat 169 target dengan 17 (tujuh belas) tujuan yaitu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial, tujuan dan target tersebut dirancang untuk dicapai hingga tahun 2030.



Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs) 17 Goals

Dari 17 SDGs diantaranya memperhatikan mengenai kendala sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, salah satu tantangan pemerintah yang sangat terlihat jelas yaitu terkait dengan lingkungan, maka dari itu dilakukannya upaya pelestarian lingkungan yang dalam hal ini telah ditetapkan pada SDGs poin ke-15 yaitu Ekosistem daratan. Tujuan utama pada SDGs poin ke-15 menekankan pentingnya melindungi, merestorasi, dan menggunakan secara berkelanjutan ekosistem darat guna memastikan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup serta ketahanan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Dalam melaksanakan SDGs di Indonesia, terdapat peraturan dan kesepakatan yang dilakukan di Indonesia, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2023), keberhasilan pelaksanaan SDGs di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sinergi berbagai pihak baik dari pemerintah, swasta, serta masyarakat. Selain pemerintah daerah dan pusat dalam hal ini transformasi masyarakat menjadi kunci strategis yang menentukan sebuah keberhasilan dari tujuan dan pelestarian lingkungan.

Menurut Piotr Sztompka (2004) transformasi sosial atau juga sering disebut dengan perubahan sosial adalah pergeseran yang terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat atau dalam suatu sistem sosial. Keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak individu yang terlibat, tetapi juga dari seberapa mendalam perubahan nilai dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan isu lingkungan. Transformasi perilaku sosial dalam konteks pelestarian lingkungan juga mencerminkan proses internalisasi nilai-nilai lingkungan hidup ke dalam kesadaran kolektif masyarakat, sehingga mendorong terjadinya perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi, informasi dan intensitas interaksi global, pola pikir masyarakat mengalami pergeseran dari yang pada awalnya berbasis pada norma-norma lokal dan kepercayaan tradisional menjadi lebih rasional dan terbuka terhadap merespon perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan (Fuad et al., 2021). Modernisasi telah mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam cara pandang masyarakat terhadap tata kelola sumber daya alam. Perubahan kemajuan diperlukan upaya strategi untuk menjaga keseimbangan antara pembaruan perilaku dan pola pikir dengan tetap melestarikan nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi keberlanjutan sosial dan ekologis. Proses ini tidak hanya bergantung pada pendekatan struktural dari pemerintah melalui regulasi dan kebijakan, tetapi juga memerlukan partisipatif yang mampu menggugah kesadaran serta membangun komitmen jangka panjang masyarakat, perubahan tersebut dapat berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pelestarian lingkungan.

Partisipasi tidaklah cukup apabila tidak disertai dengan komitmen yang berkelanjutan. Komitmen masyarakat mengacu pada kesediaan dan kesungguhan individu maupun kelompok untuk secara konsisten terlibat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, tidak hanya karena kewajiban sosial, tetapi juga karena adanya kesadaran moral dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian alam, peran komitmen masyarakat menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mengimplementasikan nilai-nilai SDGs di kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia aturan mengenai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan dituangkan Pada Pasal 67 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mengatur Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sekaligus mengharuskan agar setiap masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dengan regulasi ini, masyarakat desa memiliki landasan hukum untuk aktif dalam program-program pelestarian, serta memperoleh pengakuan resmi sebagai pelaku utama dalam proses tersebut. Pendekatan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi sinergis antara pemerintah, dan organisasi non pemerintah, serta masyarakat lokal yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan SDGs di tingkat desa.

Salah satu desa yang baik dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah Desa Adat Penglipuran, yang berada di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Memiliki jumlah penduduk 1.111 jiwa dengan total 277 KK. Desa Adat Penglipuran cukup unik dibandingkan dengan desa-desa lain, dikarenakan warga desa sangat baik dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan desa yang difungsikan sebagai area resapan air guna mengurangi risiko terjadinya banjir. Keberadaan hutan ini tidak hanya memberikan manfaat alamiah, tentunya juga dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Daya tarik utama desa adat Penglipuran yaitu terletak pada bangunan-bangunan yang tertata rapi, pintu utama (angkul-angkul) berbentuk sama dan simetris yang mencerminkan nilai kebersamaan dan kesetaraan sosial (Saputra et al., 2025). Desa Adat Penglipuran memiliki konsep tata ruang desa yang masih memegang teguh prinsip *Tri Mandala*, yaitu pembagian tata ruang kawasan menjadi tiga zona berdasarkan tiga tingkat status nilai kultural (peraturan adat) yang setiap zona memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan status yang dimiliki diantaranya yaitu *Utama Mandala* (wilayah suci), *Madya Mandala* (wilayah tengah), dan *Nista Mandala* (wilayah profan) (Bagus & Paramita, 2025). Penataan rumah penduduk di desa ini dibuat seragam dan tertata rapi, mencerminkan nilai-nilai harmoni dan kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jalan utama desa bebas dari kendaraan bermotor, sehingga menciptakan

lingkungan yang bersih, tenang, dan ramah bagi pejalan kaki, sekaligus memperkuat komitmen masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan nyaman. Keunikannya inilah yang dijadikan modal utama untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Adat Penglipuran

Desa Adat Penglipuran telah menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan lingkungan yang diakui secara nasional maupun internasional karena keunikannya dalam menjaga kebersihan, keteraturan, dan kearifan lokal. Sehingga pada tahun 2016 Desa Adat Penglipuran diberikan penghargaan oleh *Green Destinations Foundation* sebagai salah satu desa terbersih di Dunia. Pada tahun 2023 Desa Adat Penglipuran meraih penghargaan dari Organisasi Wisata Dunia dibawah Perserikatan bangsa-bangsa, UNWTO (*United National World Tourism Organization*) sebagai salah satu dari 54 *UNWTO Best Tourism Villages 2023*. Dan menerima penghargaan Kalpataru Lestari 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena konsisten dalam menjaga lingkungan.

Masyarakat Desa Adat Penglipuran menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan melalui perilaku kolektif seperti pengelolaan sampah rumah tangga, pelestarian hutan bambu yang menjadi bagian penting dari ekosistem desa, serta larangan terhadap perusakan lingkungan dalam bentuk apapun. Keberlanjutan Desa Adat Penglipuran selaras dengan harmonisasi spiritual, sosial, dan alam. Kehidupan warga desa yang masih berpegang pada nilai *Tri Hita Karana* yang merupakan tiga penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Konsep *Tri Hita Karana* pada Desa Adat Penglipuran dipercaya oleh masyarakat sebagai penyeimbang kehidupan dilihat dari adanya banyak pura yang mengelilingi Desa Adat Penglipuran yang sangat dijaga sebagai bentuk menjaga hubungan antara manusia dan Tuhan (*Pahyangan*). Adanya sistem organisasi yang bernama *Ulu Aped* dan sering disebut dengan *Desa Pengarep* yang terdiri dari 76 orang diantaranya 12 orang pertama (no urut 1-12) disebut dengan *Koncor Karos* bertugas dan membidangi kegiatan upacara-upacara dan sisanya dari 66 orang (nomor urut 13-76) disebut dengan pengarah yaitu bertugas memberikan informasi desa dengan cara berteriak sepanjang jalan Desa Adat Penglipuran tanpa menggunakan alat penguat suara, dan terdapat segala peraturan (*awigawig*) dan sanksi sebagai bentuk menjaga hubungan baik sesama manusia (*Pawong an*). Desa adat Penglipuran memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga lingkungan. Dalam *Awigawig* dijelaskan masyarakat dilarang untuk membung limbah di depan pekarangan rumah hal ini wujud menjaga hubungan manusia dengan alam (*Palemahan*) (Putu et al., 2022).

Menjaga kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran yang berlandaskan *Tri Hita Karana* perlu dipastikan dengan keberlanjutan dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan Desa Adat Penglipuran yaitu dengan adanya peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa hukum adat (*awig-awig*) adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari catur Dresta serta dijiwai oleh agama Hindu. Selain keberhasilannya dalam pelestarian lingkungan, Desa Adat Penglipuran juga menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Tradisi, upacara keagamaan, dan sistem sosial berbasis adat tetap dijalankan dengan penuh semangat oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana transformasi perilaku sosial dan komitmen masyarakat di Desa Adat Penglipuran mampu menjadi penggerak utama dalam upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga alam, tetapi juga menunjukkan sinergi antara nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dan agenda global seperti SDGs poin ke-15. Melalui penulisan ini, penulis ingin mengeksplorasi sejauh mana perubahan perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana praktik-praktik lokal tersebut dapat diterapkan oleh daerah lain.

B. Metodologi

1. *Research Design*

Penulisan ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut (Sugiyono, 2023) penulisan studi kasus merupakan suatu metode penulisan yang berangkat dari adanya identifikasi terhadap suatu "kasus" tertentu, yang dapat berupa permasalahan (*kasus negatif*) maupun potensi atau keunggulan (*kasus positif*) yang menonjol. Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh tujuan penulisan yang memperoleh

pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya terkait transformasi perilaku sosial dan komitmen masyarakat dalam melestarikan lingkungan di Desa Adat Penglipuran. Metode studi kasus dipilih karena penulisan diarahkan pada satu lokasi yang memiliki karakteristik khas, yakni Desa Adat Penglipuran, yang dikenal dengan praktik pelestarian lingkungannya. Penggunaan studi kasus memungkinkan penulis untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap peristiwa atau kondisi tertentu dalam konteks kehidupan nyata, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan tujuan penulisan.

2. *Participants (Population and Sample)*

Informan dalam penulisan ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini memungkinkan penulis untuk menentukan informan berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan permasalahan penulisan. Menurut (Sugiyono, 2023) *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penulisan. Pertimbangan ini didasarkan pada pemilihan individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau wawasan paling relevan mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, pemilihan informan juga dapat dipengaruhi oleh posisi atau peran sosialnya, misalnya sebagai tokoh yang memiliki otoritas atau kedudukan strategis, sehingga mampu mempermudah penulis dalam memperoleh akses dan menggali informasi secara lebih mendalam terkait konteks penulisan.

Tabel 1 Jumlah dan Golongan Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kelian Adat Desa Adat Penglipuran	1
2	Masyarakat Desa Adat Penglipuran	5
3	Kelompok Muda Mudi Desa Penglipuran	2
4	Kelompok Pengelola Wisata	1
5	Wisatawan Lokal	2

3. *Technique of Data Collection*

a. *Observasi*

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau peristiwa yang sedang berlangsung di lapangan secara sistematis dan terencana. Observasi bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan objektif mengenai fenomena sosial maupun perilaku subjek penulisan, dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat kejadian-kejadian yang relevan secara autentik dan rinci sesuai dengan fokus penulisan (Sugiyono, 2023). Dalam penulisan ini, observasi digunakan sebagai pelengkap data serta sebagai pembandingan hasil wawancara dengan realitas di lapangan.

b. *Wawancara*

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan dan tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dengan pihak yang diwawancarai (*interviewee*). Metode ini tidak sekadar dipahami sebagai percakapan biasa, melainkan sebagai interaksi yang memiliki tujuan tertentu, yakni menggali informasi, pengalaman, perasaan, maupun pandangan responden yang relevan dengan fokus penulisan. Menurut Nazir dalam (Auliya et al., 2020) menyatakan bahwa wawancara merupakan proses memperoleh data secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga terarah sesuai dengan kebutuhan penulisan. Dengan demikian, wawancara dapat dipandang sebagai teknik yang memungkinkan penulis menjembatani kesenjangan antara fenomena empiris dengan konsep teoritis melalui pengumpulan data yang mendalam, autentik, dan bermakna.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dalam penulisan kualitatif, studi dokumentasi berfungsi sebagai metode pelengkap yang mendukung hasil observasi dan wawancara sehingga memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

4. Instruments

1. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengendalikan seluruh proses penelitian. Peneliti menetapkan fokus kajian, berinteraksi langsung dengan informan, menafsirkan data yang diperoleh, dan memastikan keabsahan serta kredibilitas temuan. Sebagai instrumen manusia, peneliti juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan dinamika lapangan yang muncul selama proses pengumpulan data berlangsung.
2. Pedoman Wawancara
Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan, meliputi:
 - a. Pertanyaan mengenai perilaku sosial masyarakat dalam menjaga lingkungan
 - b. Pertanyaan mengenai komitmen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan
 - c. Pertanyaan tentang aturan adat (*awig-awig*) dan implementasinya
 - d. Pertanyaan terkait peran Kelian Adat, STT, dan masyarakat
 - e. Pertanyaan mengenai perubahan perilaku lintas generasi
 - f. Pertanyaan mengenai pengaruh pariwisata terhadap perilaku sosial dan lingkungan

5. Technique of Data Analysis

Dalam penulisan ini, analisis data dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak penulis menetapkan fokus penulisan, saat proses pengumpulan data di lapangan, hingga penyusunan laporan penulisan. Dengan demikian, teknik analisis data diterapkan sejak tahap perencanaan hingga penulisan berakhir.

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan tiga prosedur analisis data menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2023), yaitu:

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan tahap utama dalam setiap penulisan. Pada penulisan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, maupun kombinasi ketiganya (*triangulasi*). Proses ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan bisa berlangsung berbulan-bulan, sehingga menghasilkan data yang berlimpah. Dalam penulisan ini, penulis terlebih dahulu melakukan observasi awal terhadap objek penulisan, di mana seluruh informasi yang terlihat dan terdengar dicatat sehingga diperoleh data yang beragam dan komprehensif.
2. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data melalui menyortir data, pemfokusan, dan peringkasan pada hal-hal yang relevan dengan penulisan. Data yang dianggap kurang relevan dihilangkan, sedangkan data yang kurang akan ditambahkan. Pada proses ini membantu memberikan gambaran yang jelas, sehingga mempermudah langkah selanjutnya dalam pengumpulan dan analisis data.
3. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun bagan, sehingga memudahkan dalam memahami pola hubungan antar data. Penyajian ini berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mempermudah penulis dalam merumuskan temuan penulisan.
4. Verifikasi Data
Tahap akhir dalam analisis data adalah verifikasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dapat diperkuat dengan buktibukti yang relevan dari pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten saat penulis

kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel dan dapat dipercaya.

C. Hasil dan Pembahasan

Transformasi perilaku sosial masyarakat Desa Adat Penglipuran dalam upaya pelestarian lingkungan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sebagaimana dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin ke-15 tentang menjaga Ekosistem Daratan, pelestarian lingkungan hidup tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Perangkat desa, lembaga adat, masyarakat, dan sektor pariwisata harus bekerjasama secara sinergis. Kalaborasi antar pemangku kepentingan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan Desa Adat Penglipuran sebagai desa wisata.

Perubahan atau transformasi perilaku sosial masyarakat di Desa Penglipuran muncul dari kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan, sesuai dengan nilai Tri Hita Karana. Kesadaran tersebut kemudian berkembang menjadi pola perilaku sosial yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pemilahan sampah, melestarikan hutan bambu, dan menghindari penggunaan kendaraan bermotor di kawasan inti desa adat penglipuran.

Transformasi ini tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga didorong oleh kebijakan dan peran perangkat desa serta lembaga adat yang secara katif menanamkan nilai-nilai lingkungan melalui peraturan adat (*awig-awig*), program sosialisasi, dan pembiasaan sejak dini. Lembaga adat berperan sebagai pengendali sosial yang memastikan seluruh warga mematuhi norma kebersihan dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, pengelola pariwisata turut mendukung dengan menyediakan sarana dan kebijakna yang selaras dengan prinsip pariwisata keberlanjutan.

Transformasi perilaku sosial masyarakat di Desa Adat Penglipuran menunjukkan suatu proses perubahan sosial yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus, seiring dengan berkembangnya sosial, budaya, serta kemajuan sektor pariwisata di wilayah desa adat penglipuran. Menurut dari pandangan Pior Sztomka, transformasi sosial mencakup tiga dimensi penting, yaitu perubahan struktur sosial, perubahan budaya, dan perubahan perilaku sosial. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk pola adaptasi masyarakat terhadap dinamika zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar kehidupan sosial di desa adat penglipuran.

1. Struktur Sosial

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Struktur sosial masyarakat Desa Adat Penglipuran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di dalam struktur sosial masyarakat Bali, terutama pada komunitas adat seperti Penglipuran, peran Kelian Adat dan Seka Truna-Truni (STT) menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial sekaligus kelestarian lingkungan desa. Kelian Adat berperan sebagai pemimpin sosial yang mengatur serta memastikan nilai-nilai adat tetap dijalankan sebagai pedoman perilaku masyarakat, sedangkan STT berfungsi sebagai wadah generasi muda yang menjadi penggerak utama kegiatan sosial, gotong royong, dan upaya pelestarian lingkungan. Kedua unsur sosial ini bekerja secara sinergis dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tercipta sistem sosial yang harmonis, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang telah menjadi identitas masyarakat Penglipuran.

Kelian Adat I Wayan Budiarta menegaskan bahwa aturan adat (*awig-awig*) menjadi landasan utama dalam menata hubungan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat. Ia menyatakan:

"Dalam adat, kami memiliki tanggung jawab besar dan peran yang sangat penting. Kami punya kewajiban untuk menjaga keharmonisan lingkungan, keharmonisan antarwarga, serta keharmonisan spiritual dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Kami menjalankan itu lewat penerapan awig-awig, yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan nilai-nilai kesucian dan kebersihan lingkungan. Setiap kegiatan sosial maupun keagamaan selalu kami hubungkan dengan pelestarian lingkungan. Misalnya, sebelum kegiatan besar adat dilakukan, kami selalu mengadakan gotong royong untuk membersihkan area pura dan jalan utama desa. Ini bukan hanya rutinitas, tetapi bentuk bakti kepada alam dan leluhur. Dalam awig-awig kami disebutkan bahwa setiap warga bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar rumahnya. Warga juga dilarang membuang limbah ke got utama desa. Kalau melanggar, akan diberikan teguran, dan jika

tetap diulangi, bisa dikenakan sanksi adat berupa sangskara danda, yaitu upacara penyucian alam. Dengan cara itu, kami tidak hanya menegakkan aturan sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual antara manusia dan lingkungan."

Selain lembaga adat, struktur sosial di Desa Adat Penglipuran juga melibatkan unsur generasi muda seperti Seka Truna Truni (STT). Nengah Sandi, sebagai ketua STT menyatakan bahwa:

"Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sangat penting bagi saya, Kami sebagai masyarakat adat memegang teguh prinsip hidup Tri Hita Karana, terutama aspek Palemahan yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Prinsip ini bukan hanya sekedar falsafah, tetapi sudah dijadikan dasar dalam aturan adat yang disebut awig-awig. Jadi, setiap warga wajib mengimplementasikannya. Manusia tanpa lingkungan tidak bisa hidup. Karena itu, menjaga lingkungan berarti menjaga keseimbangan antara Bhuana Alit (mikrokosmos/manusia) dan Bhuana Agung (makrokosmos/alam)."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa awig-awig menjadi fondasi penting dalam membentuk struktur sosial, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat Desa Adat Penglipuran. Aturan adat ini tidak sekedar dipatuhi secara formal, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik nyata. Pelaksanaan awig-awig menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual, di mana kepatuhan warga terhadap aturan adat telah menjadi bagian dari identitas budaya sekaligus wujud penghormatan terhadap alam dan leluhur. Selain itu, keterlibatan generasi muda menunjukkan adanya proses regenerasi sosial, sehingga prinsip-prinsip seperti *Tri Hita Karana*, khususnya aspek *Palemahan* yang mengatur hubungan manusia dengan alam, tetap dijaga dan diwariskan secara berkelanjutan.

Dalam struktur sosial desa adat Penglipuran, masyarakat adat tidak hanya menjadi subjek yang diatur oleh awig-awig, tetapi juga berperan sebagai pelaksana utama dalam penegakan aturan tersebut. Pelaksanaan aturan adat berjalan secara bersama, di mana setiap warga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial masyarakat tidak hanya bersifat pasif, melainkan aktif dalam menjaga keberlangsungan norma adat yang berorientasi pada keseimbangan ekologis dan harmoni sosial.

Salah satu masyarakat Penglipuran, Nengah Moneng menyampaikan pandangannya terkait hal ini yang menyatakan:

"Pengaruh aturan adat di Penglipuran itu sangat kuat. Kuatnya suatu aturan itu sangat bergantung pada bagaimana pemimpin dan masyarakat dalam melaksanakannya. Kalau pemimpin adat tegas dan masyarakatnya sadar, aturan itu bisa berjalan dengan baik. Masyarakat di sini sudah paham kalau aturan itu dibuat bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga keharmonisan dan kebersihan lingkungan. Misalnya, kalau ada yang melanggar awig-awig, pertama akan diberi peringatan, tapi kalau tetap mengulang bisa dikenakan sanksi adat berupa sanksi danda, yaitu upacara penyucian alam atau mecaru. Jadi, masyarakat kami tidak hanya menaati aturan, tapi juga ikut mengawal pelaksanaannya agar tidak hanya sekedar adanya aturan tertulis."

Masyarakat Desa Adat Penglipuran berperan sebagai pelaku utama dalam menjalankan sistem sosial yang telah ditaati oleh lembaga adat, keberadaan awig-awig tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik sosial yang didorong oleh kesadaran bersama. Kondisi ini menunjukkan terbentuknya mekanisme pengendalian sosial yang bersifat komunitas, di mana norma adat berfungsi sekaligus sebagai pedoman moral dan pengikat hubungan sosial. Pelaksanaan aturan adat oleh warga mencerminkan internalisasi nilai yang mendalam, sehingga kepatuhan terhadap *awig-awig* bukan semata karena tekanan, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya serta kesadaran spiritual masyarakat.

2. Struktur Budaya

Dari hasil observasi penulis, dapat diketahui bahwa struktur budaya di Desa Adat Penglipuran berlandaskan pada sistem nilai, kepercayaan, dan norma adat yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Budaya di Penglipuran tidak hanya di maknai sebagai peninggalan leluhur, tetapi juga sebagai panduan hidup bersama yang mengarahkan cara berfikir, bertindak, dan berinteraksi dengan baik antar masyarakat maupun dengan lingkungan sekitar. ciri khas budaya Penglipuran tampak pada kemampuannya mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi tanpa kehilangan esensi dan makna budaya itu sendiri. Dengan demikian, proses transformasi budaya yang terjadi di Penglipuran bukanlah bentuk penolakan terhadap perubahan, melainkan upaya reinterpretasi dan pembaruan nilai-nilai adat agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Budaya tidak hanya dimaknai sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menjiwai tindakan masyarakat Penglipuran. Ditengah arus modrensasi dan pariwisata yang membawa perubahan sosial, masyarakat Penglipuran tetap berpegang pada nilai-nilai budaya yang diwariskan. Dalam wawancara, bersama masyarakat Wayan Supad menyatakan:

"Wisatawan pastinya membawa budaya dan kebiasaan baru yang bisa mempengaruhi masyarakat, namun kami di Penglipuran tetap berpegang pada awig-awig dan nilai adat agar tidak kehilangan jati diri, dengan adanya sosialisai dan tentunya adanya pengawasan adat masyarakat disini masih mampu menjaga dan meanjutkan budaya yang ada sebelumnya. Disini juga sudah ada aturan tata ruang yang diatur dalam awig-awig. Setiap pekarangan memiliki struktur rumah tradisional dan jarak tertentu antar bangunan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Jika keluarga bertambah, biasanya bangunan dikembangkan ke belakang tanpa menghilangkan bangunan adat di depan. Konsep tata ruang ini mempertahankan sirkulasi udara, pencahayaan, dan resapan air."

I Wayan Budiarta juga menyatakan bahwa desa adat sangat memperhatikan pelestarian budaya melalui pemeliharaan bangunan tradisional, ia menyatakan bahwa:

"Kami berkomitmen melestarikan bangunan tradisional dan warisan budaya seperti angkul-angkul, paon, dan bale sakenem, yang tidak hanya menjadi bagian fisik desa, tetapi juga simbol identitas dan nilai-nilai adat kami. Desa adat juga memberikan subsidi perbaikan kepada warga yang memperbaiki bangunan tradisionalnya agar tetap sesuai pakem. Dana subsidi itu berasal dari hasil pengelolaan pariwisata, sehingga hasil pariwisata dikembalikan ke masyarakat untuk menjaga dan memperkuat budaya serta lingkungan hidup kami. Dengan demikian, pelestarian budaya menjadi bagian integral dari keseharian masyarakat dan tercermin dalam tata ruang, arsitektur, serta praktik sosial adat yang terus diwariskan lintas generasi."

Menurut salah satu pengunjung yang pertama kali datang berwisata ke Desa Adat Penglipuran, Nana Adelia menyatakan bahwa:

"Nilai-nilai budayanya masih kuat di sini. Misalnya aja, sekarang aku pakai kebaya karena di sini memang bisa sewa baju adat. Unik banget sih menurutku, karena jarang ada tempat wisata yang menyediakan pengalaman seperti ini. Aku memang datang ke Penglipuran pengen coba pakai baju adatnya, karena cuma di sini bisa ngerasain suasana adat Bali yang kental seperti itu. Selain itu, dari bentuk rumah-rumahnya juga kelihatan banget budayanya masih dijaga. Semua rumah bentuknya hampir sama, dari ujung ke ujung terlihat seragam. Jadi kelihatan rapi, teratur, dan punya ciri khas tersendiri yang beda dari tempat lain. Kalau dilihat secara keseluruhan sih menurutku budaya dan pariwisatanya sudah berjalan dengan baik. pariwisatanya tetap jalan, tapi budayanya juga nggak hilang. Justru masyarakatnya masih berusaha menjaga nilai-nilai adat itu supaya nggak pudar walaupun banyak wisatawan yang datang."

Dalam upaya melestarikan lingkungan, masyarakat Desa Adat Penglipuran tidak hanya mempertahankan tradisi leluhur, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai budaya yang tertuang dalam *awig-awig* sebagai pedoman hidup bersama. Aturan adat tersebut berfungsi sebagai landasan dalam mengatur perilaku masyarakat agar tetap sejalan dengan falsafah *Tri Hita Karana*, khususnya aspek *Palemahan* yang menitikberatkan pada keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nengah Sandi Arta Putra selaku

Ketua STT Desa Penglipuran, terungkap bahwa nilai-nilai budaya tersebut diwujudkan melalui penerapan peraturan adat yang tegas, terutama dalam pengelolaan limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Ia menyatakan bahwa :

"Masyarakat dilarang membuang limbah ke tempat umum seperti got di jalan utama. Air limbah dari cuci tangan, cuci piring, atau mencuci pakaian tidak boleh dialirkan ke sana. Jika ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi danda, yaitu sanksi adat yang berupa upacara ritual penyucian alam (mecaru) untuk menetralkan energi negatif akibat pelanggaran tersebut."

Penerapan aturan adat dalam pengelolaan lingkungan di Desa Adat Penglipuran mencerminkan kuatnya peranan budaya lokal sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan *awig-awig* dan sanksi adat seperti *danda* bukan sekadar instrumen pengendali sosial, tetapi juga menjadi manifestasi dari sistem nilai dan kepercayaan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Melalui tradisi tersebut, masyarakat tidak hanya menjalankan aturan secara formal, tetapi juga menegaskan identitas budaya yang menempatkan keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitas sebagai satu kesatuan yang utuh.

Upacara *mecaru* yang dijalankan sebagai bentuk penyucian alam ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat memiliki makna simbolis yang mendalam. Ritual ini menggambarkan hubungan sakral antara manusia dengan alam, di mana setiap tindakan manusia dianggap memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, penerapan sanksi adat tidak hanya berfungsi untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai

budaya yang menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral.

3. Perilaku Sosial

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adat Penglipuran mengekspresikan perilaku sosialnya melalui berbagai tindakan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai, norma, dan aturan adat yang telah melekat kuat. Perilaku ini bukan sekadar kebiasaan rutin, tetapi merupakan manifestasi dari kesadaran bersama yang membimbing cara warga berpikir, bertindak, dan berinteraksi, baik antar sesama maupun dengan lingkungan sekitar. Keunikan perilaku sosial di Penglipuran terlihat dari konsistensi warga dalam melakukan kegiatan seperti gotong royong, menjaga kebersihan, dan merawat lingkungan, meskipun di tengah arus modernisasi dan pariwisata yang membawa perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelian adat Wayan Budiarta, menjelaskan bahwa:

"Kami wujudkan lewat berbagai kegiatan pelestarian seperti menjaga kebersihan, gotong royong, dan aturan-aturan adat yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan alam, dalam awig-awig kami sudah diatur dengan jelas, terutama terkait tiga hal penting yaitu parhyangan, pawongan, dan palemahan. Nah, bagian palemahan itu yang berkaitan dengan lingkungan. Di sana diatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah. Kami dulu membuat program namanya Penglipuran Berbunga, Itu adalah program penanaman bunga di jalan utama desa adat untuk mempercantik dan membuat lebih asri telajakan di depan rumah-rumah warga. Program ini melibatkan masyarakat dan menjadi simbol keindahan desa adat Penglipuran."

Perangkat STT, Bayu juga menyatakan bahwa:

"Di Desa Penglipuran, peran STT masih sangat penting dalam menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan. Kegiatan gotong royong rutin tetap dilakukan, terutama di area yang dianggap suci seperti Pura Dalem dan Gelung Agung. Kalau terlihat kotor, kami biasanya langsung bergerak bersama untuk membersihkannya. Namun, sekarang sistemnya agak berbeda. Dulu, kegiatan bersih-bersih dilakukan sepenuhnya oleh warga dan anggota STT. Sekarang, desa sudah memiliki tenaga kebersihan khusus yang digaji secara rutin. Jadi kegiatan gotong royong dari STT sedikit berkurang. Saya pribadi merasa ketika kami sendiri yang terlibat langsung dalam menjaga kebersihan, rasa memiliki terhadap desa terasa lebih kuat, sekarang karena sebagian sudah dikelola oleh petugas, semangat kebersamaan itu agak menurun, apalagi di kalangan anak muda. Selain itu, kalau dulu semua anggota bisa ikut gotong royong karena belum banyak yang kerja atau kuliah di luar, sekarang banyak anak muda yang sibuk, jadi jumlah peserta gotong royong kadang berkurang. Walau demikian, komunikasi dan koordinasi kami tetap baik karena ada media sosial seperti grup WhatsApp, jadi lebih mudah menginformasikan kegiatan".

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya perubahan bentuk kelembagaan dalam fungsi sosial masyarakat Penglipuran. Aktivitas sosial yang dahulu dijalankan sepenuhnya atas dasar sukarela kini sebagian telah beralih menjadi tanggung jawab tenaga kebersihan yang diatur secara profesional. Meski terjadi perubahan mekanisme, hal ini tidak menurunkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat, melainkan memperlihatkan adanya penyesuaian sistem sosial terhadap meningkatnya kompleksitas kehidupan modern dan kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan. Perubahan ini menggambarkan terjadinya diferensiasi sosial, di mana struktur tradisional (gotong royong) bertransformasi menjadi sistem sosial yang lebih terorganisasi. STT tetap berperan sebagai media partisipasi sosial, tetapi fungsinya bergeser dari pelaksana utama menjadi pendukung dan penggerak kesadaran sosial. Proses ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial Penglipuran tetap hidup melalui mekanisme adaptasi, bukan resistensi terhadap perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengelola wisata Penglipuran, Luh Dayanti menjelaskan bahwa:

"Terkait dengan cara dalam menjaga lingkungan, salah satunya yaitu pada saat menjual produk wisata, kita tidak menggunakan kemasan plastik, untuk makanan kita pakai bahan organik seperti daun pisang dan untuk minuman karyawan difasilitasi botol minum sendiri agar tidak menambah sampah plastik. Selain itu kita juga menghimbau wisatawan untuk memilah sampah antara organik dan anorganik. Untuk sampah organik biasanya dimanfaatkan warga untuk pupuk atau diubung keladang, sementara sampah anorganik diangkut setiap pagi oleh petugas pengangkut sampah Kabupaten Bangli. Kita juga sempat punya program we care Penglipuran, dimana program tersebut setiap pengunjung akan kami berikan kantong sampah dan diberi hadiah jika berhasil memungut sampah di area utama, tetapi program tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata sampah disini tidak ada yang berserakan tidak pada tempatnya, jadi itu artinya"

masyarakat dan wisatawan sudah sangat baik dalam menjaga kebersihan. Dalam pengelolaan desa wisata, semua kegiatan tetap melibatkan masyarakat lokal. Dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, sampai pelaksanaan, selalu dibicarakan dulu di rapat desa bersama Kelian Adat. Semua karyawan yang bekerja di bidang pariwisata juga diutamakan dari warga lokal. Sistem pariwisata di sini berbasis Community Based Tourism (CBT), artinya masyarakat sendiri yang mengelola dan mendapatkan manfaatnya”.

Prilaku sosial di Desa Adat Penglipuran memperlihatkan penyesuaian transformasi terhadap perkembangan pariwisata dan kebutuhan keberlanjutan lingkungan. Struktur sosial yang semula bersifat tradisional dan berjalan secara informal kini beralih menjadi sistem yang lebih terorganisasi melalui pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat. Penerapan konsep *Community Based Tourism (CBT)* merepresentasikan proses institusionalisasi peran sosial masyarakat, di mana warga tidak hanya menjadi objek pembangunan pariwisata, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan wisata di desa. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata juga menunjukkan adanya perubahan fungsi sosial di tingkat kelembagaan. Lembaga adat tetap memegang peran sentral sebagai otoritas moral dan pengambil keputusan strategis, sementara lembaga pengelola wisata berfungsi sebagai pelaksana teknis dan administratif dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sinergi kedua lembaga ini mencerminkan terbentuknya sistem sosial yang harmonis dan terintegrasi, di mana norma adat tidak dihapuskan, tetapi disesuaikan dengan dinamika sosial modern.

Transformasi perilaku sosial masyarakat Desa Adat Penglipuran memperlihatkan dinamika perubahan yang berlangsung secara bertahap namun signifikan. Nilai adat, norma sosial, dan kesadaran ekologis tidak hanya dipertahankan, tetapi juga mengalami penguatan dan penyesuaian sejalan dengan arus modernisasi dan perkembangan sektor pariwisata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak lahir dari dorongan aturan adat semata, tetapi terutama berasal dari kesadaran internal masyarakat yang terbangun melalui identitas budaya, rasa memiliki terhadap lingkungan, serta keyakinan spiritual mengenai pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Kondisi ini memberikan jawaban langsung atas rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk transformasi perilaku sosial masyarakat dalam menjaga lingkungan. Secara konseptual, perubahan perilaku sosial dapat muncul melalui proses internalisasi nilai, mekanisme kontrol sosial, serta tuntutan adaptasi terhadap konteks yang berubah. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Penglipuran tidak lagi menjalankan praktik ekologis karena tekanan peraturan adat, melainkan karena kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi. Awig-awig tetap berfungsi sebagai dasar normatif, namun ia kini dipahami sebagai bagian dari identitas sosial dan spiritual masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku ekologis dihasilkan dari integrasi antara nilai-nilai tradisional dan kesadaran individual, sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa transformasi perilaku sosial terbentuk melalui sosialisasi jangka panjang.

Struktur sosial memiliki kontribusi besar dalam mengarahkan transformasi tersebut. Kepemimpinan adat melalui figur Kelian Adat berperan dalam menetapkan aturan, memastikan kepatuhan, serta mengawasi pelaksanaan norma sosial. Sementara itu, generasi muda melalui Seka Truna-Truni (STT) mengambil posisi penting sebagai pelaksana kegiatan sosial, penggerak gotong royong, serta pelopor pelestarian lingkungan. Seperti temuan (Roskina, 2021), (Suseno, 2025), dan (Abidat & Nugraheni, 2024), struktur sosial yang rapi dan jelas mampu memperkuat efektivitas praktik keberlanjutan karena distribusi peran dan tanggung jawab tersusun secara kolektif. Di Penglipuran, struktur sosial terbukti tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga menciptakan pola interaksi yang membentuk kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

Struktur budaya juga memainkan peran fundamental. Nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, dan konsep kaja-kelod menjadi pedoman yang mengatur tata ruang, perilaku, dan hubungan masyarakat dengan alam. Budaya tidak hanya menjadi simbol, tetapi berfungsi sebagai pedoman moral yang diturunkan antargenerasi. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat tidak hanya mempertahankan budaya tersebut, tetapi juga menyesuaikan pemaknaannya dengan konteks kekinian, misalnya dalam pengelolaan sampah, pemeliharaan bambu, atau pengaturan tata ruang. Temuan ini memperkuat penelitian (Fathorrahman, 2020) dan (Wanudyastuti et al., 2025), yang menyatakan bahwa budaya lokal berfungsi sebagai instrumen konservasi ekologis yang efektif karena memiliki legitimasi moral dan spiritual yang kuat.

Perubahan perilaku sosial juga berlangsung melalui pembentukan kesadaran ekologis yang lebih rasional dan terinformasi. Partisipasi masyarakat dalam pelatihan pengelolaan sampah,

pembuatan kompos, serta edukasi pariwisata berkelanjutan menunjukkan adanya perpindahan dari perilaku berbasis kebiasaan tradisional menuju perilaku berbasis pengetahuan. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya mengikuti aturan adat, tetapi juga memahami alasan ekologis di balik setiap tindakan. Perpaduan antara nilai tradisional dan pemahaman modern ini membentuk perilaku yang lebih kreatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Modernisasi dan berkembangnya pariwisata turut mengubah struktur kerja masyarakat. Gotong royong yang sebelumnya dilakukan secara sukarela kini dilengkapi dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Walaupun terjadi diferensiasi sosial, nilai-nilai budaya tetap dipertahankan. Adaptasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Penglipuran berhasil menggabungkan efisiensi modern dengan keluhuran tradisi. Fenomena ini mencerminkan ketahanan budaya (*cultural resilience*) yang memungkinkan komunitas tetap stabil meski menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif keberlanjutan, perilaku sosial masyarakat Penglipuran merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik konkret seperti menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan hutan bambu, dan mempertahankan tata ruang tradisional menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dicapai melalui mekanisme komunitas lokal yang memiliki struktur sosial dan budaya kuat. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak harus menghilangkan nilai lokal; sebaliknya, budaya tradisional bisa menjadi penguat keberlanjutan

D. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Adat Penglipuran tentang Transformasi Perilaku Sosial dan Komitmen Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan Guna Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menunjukkan bahwa perubahan perilaku sosial telah terjadi, meskipun prosesnya lambat namun signifikan. Nilai adat, norma sosial, dan kesadaran ekologis yang diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka menunjukkan transformasi ini. Perubahan ini menunjukkan bahwa keinginan warga telah berubah dari hanya mematuhi aturan adat menjadi kesadaran yang didasarkan pada pengetahuan tentang pentingnya menjaga harmoni manusia-alam, selaras dengan prinsip Tri Hita Karana. Hasil ini menjawab tujuan awal penelitian: mengidentifikasi jenis perubahan perilaku sosial sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selain memenuhi awig-awig sebagai tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab moral dan kebanggaan masyarakat. Mereka menunjukkan komitmen mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, pengelolaan sampah secara partisipatif, melindungi hutan bambu, dan mengatasi tekanan pariwisata tanpa kehilangan nilai adat dan kualitas lingkungan. Hasil ini menjawab tujuan kedua penelitian, yaitu melihat seberapa besar kontribusi komitmen masyarakat terhadap pencapaian poin 15 SDGs keberlanjutan ekosistem daratan.

Secara keseluruhan, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penemuan tentang bagaimana internalisasi nilai budaya dan rasa malu sosial (*social shame*) menjadi mekanisme kontrol yang sangat efektif untuk mendorong keberlanjutan lingkungan. Dimensi ini belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Menurut penelitian ini, kearifan lokal, aturan adat, peningkatan pengetahuan ekologis, dan adaptasi desa terhadap modernisasi dapat menghasilkan model pelestarian lingkungan yang berkelanjutan berbasis komunitas. Selain memperkaya penelitian teoretis tentang transformasi perilaku sosial dan komitmen kolektif masyarakat adat, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis sebagai model pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan oleh desa wisata lain untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. Referensi

- Abidat, A. H., & Nugraheni, N. (2024). PERAN KONSERVASI LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). *Jurnal Samudra Geografi*, 7(1), 1-6.
- Aliyah, P. N., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs). *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 105-123.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Fathorrahman, F. (2020). Budaya Perilaku Bersih Di Desa Penglipuran Bali. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 149-172.

- Fuad, S., Effendi, N., & Ronaning, E. (2021). Perubahan *Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital*. 5(1), 69–87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>
- Paramita, I. B. G. (2025). Integrasi kearifan lokal Tri Hita Karana dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan: Studi kasus Desa Penglipuran, Bali. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 6(1), 63-74.
- Putu, N., Candra, I., & Kharisma, I. W. W. (2022). *Masyarakat Bali dalam pengembangan Desa Wisata*. 2(2), 60–70.
- Saputra, A., Sabrina, D. N., Faizah, N., Awaliyah, A., Mumpuni, A., Setiabudi, U. M., & Brebes, K. (2025). *Desa penglipuran sebagai simbol pelestarian kearifan lokal bali*. 3(6).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta